

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINADINE) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

Fery Wahyudi¹⁾, Ika Devi Pramudiana²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: wahyudifery68@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat. Aplikasi SINADINE adalah sistem aplikasi tata naskah dinas elektronik yang dibuat oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam hal pengelolaan tata persuratan elektronik kearsipan di wilayah Kementerian Agama wilayah Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan subjek penelitian yang terlibat yaitu kepala kantor dan karyawan atau staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Naskah Dinas elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan merupakan upaya dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan tata naskah dinas dalam pengelolaan dan integrasi data untuk pengarsipan di lingkungan kantor Kementerian Agama di Jawa Timur, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Penerapan aplikasi SINADINE ini dapat memberikan manfaat yaitu untuk mempermudah pegawai dalam pengelolaan, pengarsipan, dan pencarian dalam administrasi persuratan serta dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun, masih adanya kekurangan dalam proses penerapan aplikasi SINADINE mulai dari sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai aplikasi, serta kurangnya sosialisasi kepada pegawai. Sehingga, menghambat proses persuratan yang ada di lingkungan Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur.

Kata Kunci: Kearsipan, Arsip Digital, E-Government

Abstract

The research is intended to analyze and describe the application of the Electronic Official Document Information System (SINADINE) application at the Lamongan Regency Ministry of Religion Office and identify supporting and inhibiting factors. The SINADINE application is an electronic official document management application system created by the Ministry of Religion of East Java Province in terms of managing archival electronic correspondence in the area of the Ministry of Religion in the East Java region. This research is field research, with a qualitative descriptive approach, where researchers go directly into the field to collect data directly. The data collection techniques are through interviews, documentation, and the research subjects involved are the head of the office and employees or staff at the Lamongan Regency Ministry of Religion office. Based on this research, it can be concluded that the implementation of the electronic Official Document System (SINADINE) application in the Lamongan Regency Ministry of Religion Office is an effort by the East Java Province Ministry of Religion Office to facilitate the administration of official documents in managing and integrating data for archiving within the Ministry of Religion office environment in East Java, especially the Lamongan Regency Ministry of Religion office. Implementing the SINADINE application can provide benefits, namely to make it easier for employees to manage, archive and search in correspondence administration and can save time, energy and costs. However, there are still shortcomings in the process of implementing the SINADINE application, starting from human resources, lack of understanding of the application, and lack of socialization to employees. Thus, hampering the correspondence process within the Ministry of Religion in the East Java region.

Keywords: Archives, Digital Archives, E-Government

A. LATAR BELAKANG

Aplikasi SINADINE merupakan sistem tata naskah dinas secara elektronik yang berbasis web atau jaringan, sehingga mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai dalam mengelola surat kapanpun dan dimanapun. Komponen atau sarana prasarana yang digunakan untuk membangun aplikasi SINADINE sudah sangat baik. Aplikasi ini sangat menunjang aktivitas persuratan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, namun masih terdapat kendala teknis dari aplikasi SINADINE dan kendala dalam penerapan aplikasi yakni sulitnya mengubah mindset pegawai untuk menggunakan aplikasi SINADINE.

Aplikasi SINADINE adalah sistem tata naskah dinas elektronik yang dibuat Oleh kementerian agama wilayah Jawa Timur. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama memerlukan adanya ketatausahaan yang tertib dan baik agar tujuan organisasi bisa dicapai. Pada bagian lain, Kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa memiliki banyak inovasi kebijakan lain yang aplikatif. Kebijakan yang dimaksud tidak harus merupakan turunan langsung dari regulasi pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Agama wilayah Jawa Timur membuat kebijakan praktis dalam bentuk regulasi Surat Keputusan Kepala Kanwil, Surat Edaran, dan sebagainya. Bisa dicetuskan sesuai dengan kebutuhan birokrasi dan organisasi di lingkungan Jawa Timur tentang penggunaan aplikasi berbasis web dalam hal ini Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) kebijakan berbasis internet di era pandemi Covid-19.

Kantor Kementerian Wilayah Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yang cukup sentral dalam menyukseskan sejumlah agenda pembangunan di wilayah jawa timur telah membuat dan mengembangkan sebuah sistem informasi atau aplikasi untuk mendukung koordinasi yaitu aplikasi Sistem Informasi

Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) yang dapat diakses melalui website www.sinadinejatim.kemenag.go.id/login sebagai salah satu wujud dari penerapan *kebijakan e-government*.

Sistem informasi atau aplikasi ini dibuat pada tahun 2019 di awal Covid-19 melanda. Aplikasi Surat Elektronik merupakan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen data dalam sistem yang terintegrasi. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan perkantoran khususnya dalam hal administrasi kantor yang digunakan untuk mempermudah dalam hal persuratan, seperti surat masuk, surat keluar, disposisi, pencarian dan pelaporan arsip surat di lingkungan Kantor Wilayah Agama di Jawa Timur. Manfaat dibuatnya aplikasi ini adalah status disposisi atau alur disposisi dapat diketahui dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar lebih tertata dan terintegrasi.

Tantangan utama dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) yaitu terletak pada Sumber Daya Manusia dan bukannya teknologi pendukung dalam hal ini, kurangnya tenaga yang membidangi aplikasi tersebut, padahal sudah sering disosialisasikan kepada pegawai terkait dengan aplikasi ini. Selain itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang aplikasi dan e-government belum berjalan optimal karena kurangnya kepedulian ASN dalam mengerjakan tugasnya. Surat elektronik yang berjalan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mendukung proses koordinasi karena belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal fitur atau item terkait menu layanan surat keluar. Fakta dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas menerangkan bahwa penerapan e-government merupakan upaya kantor kementerian Agama Kabupaten Lamongan dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pengelolaan surat menyurat yang tepat dan cepat dalam kegiatan administrasi kedinasan.

Terkait dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menarik penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi

Naskah Dinas Elektronik SINADINE di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan”.

Dengan demikian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan menurut Lukman dalam Sinambela (2006:5) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau masih secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Ratminto, (2006:3) menyatakan pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal lainnya yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Pendapat lain mengenai pelayanan umum dikemukakan oleh Moenir H.A.S (2006:26) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Menurut Parasuraman et al. (1988) mengungkapkan ada 22 faktor penentu *service quality* yang dirangkum ke dalam 5 faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah SERVQUAL, yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible* (Steven Darwin, et, al., 2014).

2. *Electronic Government (E-Government)*

Electronic Government (E-Government) yakni rangkaian tindakan antara pemerintah dengan masyarakat atau warganya melalui sistem informasi berbasis internet, smartphone, gadget dan teknologi digital lainnya dengan dasar tujuan agar memperbaiki mutu serta kualitas pelayanan publik yang efisien, akuntabel, transparan dan efektif. Menurut Keppres Nomor 20 Tahun 2006 *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

E-government merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) guna bisa meningkatkan kinerja pemerintahan dalam bersinggungan atau bertaut dengan masyarakat, bisnis, organisasi dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*. Menurut Kominfo, *E-government* merupakan usaha untuk bermaksud bisa menebarkan pembuat layanan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tujuan dan manfaat implementasi *E-government* yakni dengan memunculkan dan membangkitkan pemerintahan yang kian bertanggung jawab (*accountable*) bagi warga negara atau bagi masyarakatnya. Melalui *E-government* masyarakat yang bisa mengakses dan membuka pintu informasi, pemerintahan juga bisa lebih efisien dan efektif, serta dapat terkabulnya layanan pemerintahan yang

layak dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan subjek penelitian yang terlibat yaitu kepala kantor dan karyawan atau staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian, diantaranya yaitu:

1. Penerapan *e-government* melalui aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang menyangkut segala infrastruktur *e-government* berupa hukum atau kebijakan dan sumber daya manusia di dalam melaksanakan *e-government*.
2. Peneliti membatasi masalah dengan menggunakan pengembangan *e-government* yaitu *support* dan *capacity*. Peneliti tidak menggunakan elemen *value* dikarenakan penggunaan aplikasi (SINADINE) dikarenakan aplikasi ini dibuat hanya sebagai layanan administrasi tata naskah Dinas Elektronik para pegawai dalam instansi Kementerian Agama di Jawa Timur.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk itu data penelitian yang berupa catatan lapangan dan hasil wawancara akan dianalisa menggunakan alat analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah data model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles Huberman.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Indikator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu dukungan (*support*) dan

kemampuan (*capacity*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, wawancara langsung ke lapangan dengan informan, dan wawancara dengan beberapa Stakeholder di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.

a) Dukungan (*Support*)

Support merupakan salah satu elemen awal dari inisiatif pembangunan *e-government* yaitu berupa dukungan. Bentuk dukungan (*support*) tersebut diantaranya terdiri dari adanya bukti keseriusan kantor kementerian agama Kabupaten Lamongan dalam penerapan *e-government* dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan-peraturan sebagai landasan hukum dalam penerapan *e-government*. Selain itu perlu adanya sosialisasi tentang peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dalam dalam hal memberikan dukungan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan telah memiliki komitmen serta visi yang jelas untuk terus mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap Aplikasi dalam menerapkan kebijakan *e-government*. Bentuk dukungan lainnya dari kantor kementerian Agama Kabupaten Lamongan yaitu dengan penyediaan server dan selalu melakukan penguatan infrastruktur jaringan yang akan menunjang kelancaran dalam penerapan aplikasi SINADINE.

Seluruh pegawai Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagian besar telah menggunakan aplikasi SINADINE sesuai dengan prosedur yang ada dan cukup dipahami oleh sebagian pegawai. Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan Sosialisasi terkait penerapan aplikasi SINADINE hingga sampai saat ini aplikasi SINADINE masih terus dikembangkan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas

Elektronik (SINADINE) ini untuk pendisposisian surat.

Sosialisasi juga telah dilakukan tim kearsipan dan PTSP dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur kepada seluruh pegawai dan staf di lingkup kementerian agama di Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan terkait tentang bagaimana prosedur penggunaan, maupun pemahaman pegawai mengenai aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE).

b) Kemampuan (*Capacity*)

Elemen *capacity* terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sumber, dan infrastruktur teknologi. Kondisi yang ada terkait sumber daya manusia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan masih ada beberapa yang belum terlalu paham mengenai aplikasi tersebut. Ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya faktor usia dan ada juga pegawai yang tidak membidangi bagian teknologi informasi. Teknologi Infrastruktur merupakan sebagian dari keberhasilan dalam penerapan *e-government* dan merupakan sebuah *tools* di dalam pelaksanaannya. Teknologi infrastruktur terdiri dari banyaknya jumlah komputer yang tersedia, jaringan internet maupun jaringan komputer yang menunjang kemudahan bagi pegawai dalam mengoperasikannya.

Kondisi infrastruktur teknologi yang mendukung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sudah cukup tersedia yaitu yang terdiri dari perangkat keras (komputer, printer, dan lain-lain) serta perangkat lunak (*server*, jaringan, aplikasi, dan lain-lain).

2. Faktor Pendukung dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

a) Adanya Dasar Hukum serta Komitmen Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang peneliti lakukan, faktor pendukung yang pertama yaitu adanya komitmen bersama dengan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disajikan dalam mendukung proses administrasi persuratan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, sesuai dengan dasar hukum yang mendasari kebijakan penerapan *e-government* melalui aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE)

b) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan infrastruktur teknologi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dalam menunjang keberhasilan penerapan *e-government* melalui aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) sudah memadai dan layak untuk dipergunakan.

3. Faktor Penghambat dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang pertama yaitu sumber daya manusia. Hambatan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) terkait sumber daya manusia yaitu tingkat kesadaran dan kepedulian pegawai yang masih rendah terhadap aplikasi SINADINE ini yang terkadang lambat untuk merespon surat yang telah masuk di aplikasi sehingga memperlambat proses persuratan sehingga harus mengingatkan dan memberitahukan lagi secara manual.

- b) Kurangnya Sosialisasi Kepada Pegawai
- Menurut pengamatan peneliti, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan tim dari Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan mengenai aplikasi SINADINE hanya sekali saja yang diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Hal ini yang menjadikan masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) ini dan tidak ada sosialisasi lagi kepada seluruh pegawai di Kantor Kementerian Agama Lamongan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan telah berjalan dari segi kebijakan, sebab kebijakan penerapan aplikasi SINADINE ini telah membantu dalam hal digitalisasi administrasi persuratan dalam sektor pemerintahan khususnya di Kementerian Agama di Jawa Timur.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, maka selanjutnya penulis memberikan beberapa rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINADINE) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai pelengkap penelitian diantaranya melakukan sosialisasi sebisa mungkin yang dikemas secara menarik agar dapat membangun kesadaran dan kemauan pegawai untuk bisa menggunakan aplikasi SINADINE.

Selain itu sosialisasi seharusnya dilakukan secara lebih intensif, kontinyu, dan konsisten terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi SINADINE agar

seluruh pegawai dapat menggunakan dan merasakan manfaat dengan adanya aplikasi SINADINE ini. Sehingga penerapan *electronic government (e-government)* dapat menjadi prioritas utama guna memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi dan sumber daya manusia maupun kebutuhan lainnya dalam penerapan aplikasi SINADINE.

Agar penerapan aplikasi ini dapat digunakan secara maksimal dalam administrasi persuratan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut guna mempercepat proses persuratan, pengarsipan, menghemat biaya, dan lebih efektif serta efisien. Serta perlu adanya sikap responsif dari seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan apabila menerima notifikasi surat, sehingga proses surat menyurat yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dapat diproses dengan cepat sehingga layanan administrasi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya.

REFERENSI

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing.
- Darmawan, N. D. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dwiyanto, A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-Government in Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185).
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

